

Identitas Pemuda Tionghoa Pasca Reformasi: Nasionalisme dalam Transformasi Kepemimpinan pada Organisasi Sosial di Lasem, Jawa Tengah

Munawir Aziz *)

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang eksplorasi identitas pemuda Tionghoa di Lasem pasca reformasi, dengan fokus pada proses transformasi kepemimpinan pada organisasi keagamaan dan religius warga Tionghoa (Yayasan Tridharma Klenteng Cu Ang Kiong dan Hoo Hap Hwe Koan Rukun Santosa, Lasem). Riset ini mengeksplorasi tema-tema identitas Tionghoa di luar pusat pemerintahan Jakarta, untuk mengetahui dampaknya di daerah. Setelah tahun 1998, arus besar pemuda Tionghoa di Indonesia terjadi dengan kecenderungan ingin menjadi bagian dari dunia global, yang tidak berpengaruh sentimen etnis dan berkarya di lembaga ekonomi internasional maupun organisasi transnasional. Dengan demikian, nasionalisme dipahami sebagai bagian yang jauh dari genggamannya. Namun, hal ini tidak berlaku sepenuhnya bagi pemuda Tionghoa di Lasem. Di kota ini, pemuda-pemuda Tionghoa masih berkomitmen dengan nilai-nilai nasionalisme dengan menciptakan gerakan budaya dengan menggerakkan organisasi-organisasi sosial. Dengan melakukan wawancara mendalam dan penelitian arsip-arsip lokal, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pada pemetaan identitas pemuda Tionghoa dan orientasinya pada spirit nasionalisme, khususnya pada daerah di luar kota Jakarta. Penelitian ini memberikan bukti bahwa ikatan dengan kebudayaan akan menghasilkan relasi yang kuat dengan tradisi dan memberikan dampak positif bagi identitas nasionalisme pemuda.

Kata kunci: *pemuda Tionghoa, nasionalisme, organisasi sosial, tradisi etnis, Lasem*

ABSTRACT

This article explores Chinese youth identity in Lasem post reformation with a focus on leadership transformation in ethnic Chinese religious organizations (Yayasan Tridharma Klenteng Cu Ang Kiong and Hoo Hap Hwe Koan Rukun Santosa, Lasem). This research explores the theme of Chinese ethnic identity outside Jakarta in order to determine its impact in other regions. After 1998 there was a massive influx of Chinese youth with inclinations to be part of the global world. This did not influence ethical sentiments or efforts in international economic institutions or transnational organisations. Nationalism can thus be understood as beyond our reach. However, this matter does not apply fully to Chinese youth in Lasem. In this town, Chinese youth maintain a commitment to nationalistic values through the creation of cultural movements and social organizations.

* Penerima Hibah Riset Studi Kepemudaan (HRSK) dari YouSure untuk Kategori Junior. Munawir Aziz adalah alumnus Center for Religious and Cross Culture Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

By doing in-depth interviews and historical research, this study seeks to contribute to the mapping of Chinese youth identity and its stance on nationalism, especially in regions outside of Jakarta. The study provides evidence that cultural links will produce a strong relationship with tradition and have positive impacts on nationalistic youth identity.

Keywords: *chinese youth, nationalism, social organization, ethnic tradition, Lasem*

PENDAHULUAN

Momentum 1998 melahirkan dampak penting bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia, yakni terbukanya kran aspirasi di panggung politik, tetapi juga mewariskan luka mendalam bagi korban tragedi kekerasan. Gerakan rakyat pada Mei 1998 telah meruntuhkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun dan memunculkan pemerintahan era reformasi. Di ruang publik, warga Indonesia menemukan kebebasan untuk bersuara, berpendapat dan menyampaikan aspirasinya tanpa represi politik. Meski demikian, ambruknya rezim Soeharto juga dibarengi dengan tragedi kemanusiaan yang memilukan ketika ribuan warga Tionghoa dibantai, diperkosa dan ratusan toko dijarah serta dihancurkan massa¹.

Di kalangan warga Tionghoa, peristiwa tragis ini menjadi puncak kegetiran setelah selama tiga dasawarsa rezim Orde Baru membatasi gerak mereka dengan stigma negatif pasca tragedi 1965. Begitu pula, Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967 telah memberangus ekspresi kebudayaan, kepercayaan dan keagamaan Cina di Indonesia (Sukma, 2004: 131-5; Suryadinata, 1987: 87; G Tan, 2008: 25). Represi ini mulai reda sejak tanggal 17 Januari 2000,

ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14/1967. Setelah reformasi, muncul dilema di kalangan pemuda Tionghoa di Indonesia karena bayang-bayang memori represi pemerintahan Orde Baru dan tragedi kemanusiaan saat tumbangnya rezim Soeharto, namun mencuat peluang berekspresi di panggung politik dan kebudayaan setelah 1998.

Di tengah arus diskriminasi dan trauma sejarah atas narasi etnis, pemuda Tionghoa yang berpendidikan dan kaya lebih memilih untuk menjadi bagian dari aktivis lembaga internasional yang memiliki prospek mapan dalam ekonomi dan karir. Hal ini tidak sedikit berpengaruh pada komunikasi internal pemuda Tionghoa dan nilai-nilai nasionalisme. Akan tetapi, di Lasem, sebagian besar pemuda Tionghoa masih terus bergerak untuk meramaikan klen- teng, mengelola yayasan Tridharma dan organisasi sosial Hoo Hap Hwee Kwan, yang sangat terasa pengaruhnya bagi warga Tionghoa Lasem. Peran pemuda Tionghoa di Lasem itu bisa dilihat pada agenda Kirab Budaya Peringatan Makco Klenteng Cu Ang Kiong pada 20 April 2012 yang diikuti 62 Klenteng se-Indonesia. Dilihat dari kajian teoritik, penelitian tentang identitas Pemuda Tionghoa Lasem ini untuk memahami sisi lain yang berbeda dengan arus besar pemuda Tionghoa di Indonesia selama ini yang cenderung lebih senang bersekolah, bekerja dan menetap di luar negeri daripada mengelola potensi kebudayaan dan menjaga ikatan sosial di wilayahnya sendiri.

1 Filomeno V. Aguilar. *Citizenship, Inheritance, and the Indigenizing of "Orang Chinese" in Indonesia*. Positions: East Asia Cultures Critique. Volume 9, Number 3, Winter 2001. Hal. 501-2., Ju Lan, Tung. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010: 2; Dawis, Aimee. *The Chinese of Indonesia and their search for identity: the relationship between collective memory and the media*. New York: Cambria Press. 2009: 3-10

PEMUDA LASEM DALAM RELASI ANTAR BUDAYA

Relasi sosial antara warga Tionghoa, pribumi Jawa dan santri di Lasem membentuk sebuah model harmoni dalam hubungan masyarakat yang dipengaruhi oleh negosiasi kepentingan antarpribadi maupun elit di berbagai golongan. Negosiasi ini tampak pada jalur komunikasi yang dibangun bersama untuk menjaga perdamaian dan membendung kekerasan, yang disebabkan oleh pengaruh politik nasional, khususnya pada tahun 1998. Ketika warga Tionghoa di Jakarta, Solo dan Semarang pada 1998 menjadi korban kekerasan, namun di Lasem hal itu tidak terjadi. Komunikasi antar elit di Lasem untuk menjaga perdamaian melalui deklarasi “Lasem milik Bersama” pada 1998 merupakan model negosiasi untuk menjaga iklim harmonis di kota ini. Relasi sosial yang dibangun dengan perasaan saling percaya di level elit dan akar rumput (*grassroot*) merupakan inti dari iklim harmonis antarwarga di Lasem. Relasi damai inilah yang menjadi modal sosial warga Lasem untuk saling berbagi dan berkomunikasi dalam keseharian.

Peran generasi peranakan hasil perkawinan campuran antar etnis di Lasem turut menjadi penguat kohesi sosial dan jembatan untuk meningkatkan perasaan saling percaya di antara warga. Meningkatnya populasi generasi peranakan di Lasem juga menjadikan sekat-sekat perbedaan etnis semakin meluruh, sehingga mempersempit perbedaan budaya. Meskipun demikian, perasaan untuk dianggap sebagai bagian inti warga Lasem merupakan harapan dari generasi peranakan Tionghoa, yang menganggap diri sebagai bagian dari bumiputra, untuk menggantikan terma pribumi yang terkesan eksklusif. Hal ini tergambar dari ungkapan Heru Karyanto;

“Saya lebih senang menyebut diri saya sebagai bagian dari bumiputra. Sebab,

kalau pribumi itu seolah ada sekat antara warga keturunan Cina dengan warga Jawa dan santri Lasem. Namun, kalau menyebut bumiputra, itu semua orang yang lahir dan besar di Lasem, maka saya dan teman-teman Cina juga dapat masuk dalam kategori itu sehingga dapat bersama-sama berkontribusi pada kehidupan masyarakat di kota ini dengan kemampuan masing-masing.”²

Apa yang dirasakan dan diungkapkan Heru Karyanto sebagai generasi peranakan Tionghoa di Lasem menunjukkan usaha untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok, yakni warga sebuah kota. Sebagai bagian dari kelompok minoritas, Heru Karyanto dengan sadar mengidentifikasi diri dengan sebutan orang Tionghoa, namun lebih suka menjadi bagian dari kelompok bumiputra, untuk menghilangkan eksklusifitas yang dalam sekat etnis yang diproduksi oleh kepentingan penguasa, yakni pribumi dan non-pribumi. Meskipun mendominasi bidang ekonomi level tengah dan makro, warga Tionghoa Lasem tetap menjadi minoritas di tengah warga pribumi Jawa dan santri. Dengan demikian, orang Tionghoa menempati posisi minoritas dalam ruang sosial budaya dan struktur politik. Maka dari itu, apa yang diungkapkan oleh Heru Karyanto merupakan bagian dari pembentukan identitas sosial, untuk menjadi bagian dari kelompok dominan, dengan meluruhkan identitas primordial sebagai orang Tionghoa semata.

Akan tetapi, dalam ruang sosial yang demikian luas, tidak semua orang Tionghoa Lasem memiliki pandangan yang sama dengan harapan Heru Karyanto. Pola pemikiran inklusif hanya bisa dibangun dengan interaksi intensif dengan kultur dan tradisi yang berbeda. Proses sosial politik yang dialami oleh Heru Karyanto yang terlibat langsung pada usaha negosiasi damai de-

2 Wawancara dengan Heru Karyanto, Lasem, 21 April 2012.

ngan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Lasem (FKML), bersama dengan KH. Thaifoer³ dan Pak Khamim⁴, menjadi landasan untuk menghilangkan perbedaan tradisi berbasis etnis.

Usaha untuk meluruskan penanda identitas yang sempit sebagai orang Tionghoa ke arah penanda identitas sebuah kelompok mayoritas merupakan usaha untuk menjembatani jurang perbedaan di antara warga Lasem, dengan latar belakang kultur dan kepercayaan yang beragam. Meski demikian, bagi orang Tionghoa yang rendah kuantitas maupun kualitas interaksinya dengan pribumi Jawa dan santri masih masuk dalam lingkaran eksklusif tradisi kelompoknya. Faktor ekonomi dan latar belakang agama ikut menentukan kualitas interaksi antara warga Tionghoa dengan warga lainnya. Hal ini tampak dari pernyataan Sie Hwie Djan (Gandor), salah satu warga Tionghoa dari Karangturi:

“Ada juga yang tidak mau berteman dan srawung [bergaul] dengan warga Lasem pada umumnya. Latar belakang ekonomi, dan agama. Khususnya, agama Kristen. Ekonominya dari dulu ndak pernah mlarat [miskin], warisan kekayaan dari

mbah-mbahnya [leluhurnya]. Biasanya mereka yang punya usaha toko Emas dan tukang Gigi.”⁵

Pernyataan Sie Hwie Djan bisa menjadi refleksi bagaimana relasi sosial menjadi instrumen penting untuk membentuk dan menjaga keharmonisan di sebuah masyarakat yang beragam latar belakang kulturnya. Intensitas interaksi dengan anggota kelompok yang berbeda menentukan pemahaman terhadap keragaman, hingga dapat mengelola perbedaan sebagai bagian untuk saling melengkapi antar golongan. Proses pembentukan identitas sosial orang Tionghoa Lasem yang menginginkan sebagai bagian dari “bumiputra”⁶ merupakan strategi budaya untuk melibatkan diri dalam sebuah kelompok sosial yang saling berhubungan pada struktur sosial warga Lasem. Penamaan bumiputra akan meluruskan sekat yang membatasi diri yang selama ini melekat pada klaim pribumi dan non-pribumi.

Dalam menganggapi imajinasi bumiputra yang disampaikan Tjan Khing Hwie sebagai warga Tionghoa yang lahir di Lasem dalam menunjukkan identitas personal, salah seorang pemuda dan pengurus Yayasan Masjid Kota Lasem, Akrom Unjiya mengungkapkan;

“Bagus sih, cuma kedengarannya kok lucu aja, orang dia kan lahir dan besar di Lasem, to? Itu berarti secara kultural

3 Kiai Thaifoer merupakan salah seorang kiai cum aktivis asal Lasem, ia pernah menjadi santri kepercayaan Kiai Ma'shoem, salah seorang Kiai penting di tanah Jawa. Kiai Thaifoer juga pernah menjabat sebagai ketua Anshor Lasem, yang membawa Banser (Barisan Serba Guna) yang bentrok dengan anggota PKI di Lasem, pada pertengahan tahun 60-an. Terakhir, Kiai Thaifoer menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Jaringan kultural dan politik Kiai Thaifoer memungkinkan ia sebagai simpul komunikasi antara santri dan orang Tionghoa, hal inilah yang menjadikan dirinya sebagai pelopor perdamaian pada masa ketegangan politik di kota Lasem, pada medio Mei 1998. Wawancara dengan Luthfie Thomafie (putra Kiai Thaifoer), Lasem, 23 Juni 2012.

4 Pak Khamim adalah kepala desa Dasun, pada masa Orde Baru, ia menjadi saksi mata atas peristiwa pendudukan Jepang di Lasem, kemerdekaan Indonesia, tragedi 1965, hingga peristiwa 1998 di Lasem (wawancara dengan Pak Khamim, Lasem, 24 Juni 2012).

5 Wawancara dengan Sie Hwie Djan (Gandor), Lasem, 09 Juni 2012

6 Bumiputra atau “*boemipoetra*,” awalnya merupakan istilah yang digunakan oleh sarjana-sarjana maupun tokoh pergerakan di negeri ini, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Boemipoetra merujuk pada siapa saja yang berperan dalam gerakan intelektual dan politik untuk mengupayakan kemerdekaan, tanpa mempedulikan sekat etnis, agama dan budaya (Dakhidae, 2003: 78-85). Istilah boemipoetra juga banyak dipakai oleh pers-pers pribumi di awal abad ke-20, yang dipimpin oleh Tirta Adi Soerjo, misalnya *Soeloeh Keadilan, Selompret Melayu dan Medan Prijaji* (Rahzen, 2007).

maupun struktural ya warga Lasem bumiputra dan bangsa Indonesia.....

Menurutku jarak adalah bagaimana dirinya sendiri memaknai dan mengimple-mentasikan yang secara sosial budaya, soal etnis adalah persoalan lain. Ia melekat pada setiap orang yang terlahir di dunia ini dan akan ia bawa kemana pun ia berada, persoalannya adalah itu tidak untuk dipertentangkan dan diisukan sebagai SARA dan senjata sosial politis dan penindasan sesama.”⁷

Ungkapan Unjiya ini menegaskan bahwa orang Tionghoa sebenarnya diterima oleh pribumi maupun kalangan santri, sebagai bagian bersama dari struktur sosial di Lasem. Unjiya menyatakan bahwa isu etnis merupakan perkara politik yang perlu didekati dengan pemikiran yang jernih. Hal serupa juga disampaikan Galih Pandu, pemuda Lasem, tentang bagaimana orang Tionghoa itu menjadi bagian dari kehidupan orang Lasem, meskipun memiliki perbedaan kultur dan agama:

“Bumiputra memang selama ini ditujukan untuk para pribumi dan atau suku asli yang hidup di nusantara. Saya rasa, dalam hal ini, konteksnya khusus di Lasem, mengingat telah seberapa lama masyarakat Tionghoa datang dan lebur dengan masyarakat pribumi patut juga ditanggapi (pembahasan bumiputra). Hal yang sederhana barangkali begini, dengan adanya peristiwa seperti ini, bukankah secara tidak langsung, seseorang bahkan telah bertaruh menanggalkan identitas dirinya yang sebenarnya telah mengalir dari darahnya darah daging leluhurnya, dan menggantikannya dengan sebuah identitas yang secara tidak langsung melekat karena kedekatan dan rasa memiliki, jika didasari pada hal itu, saya rasa mas munawir, Lasem atau masyara-

kat Lasem semua tak akan pernah merasa tercuri dengan pernyataan seperti itu, justru sebaliknya, pernyataan itu telah menjadi ungkapan kedekatan masyarakat Tionghoa bahkan sejak dulu, kedekatan bahkan telah terjalin oleh para leluhur di Lasem. Para leluhur asli maupun pribumi maupun pendatang yang rukun dan mesra berdampingan.”⁸

Di Lasem, warga Tionghoa dapat hidup berdampingan dengan pribumi Jawa dan santri, untuk bersama-sama membangun kehidupan di kota ini. Perdebatan tentang asli dan non-asli pada konteks hubungan sosial di antara orang Indonesia pernah disinggung oleh presiden Soekarno, pada pembukaan Kongres Nasional ke-8 BAPERKI di Istana Olahraga Gelora “Bung Karno” pada 14 Maret 1963:

“Saya sendiri menanya diri saya kadang-kadang. He Sukarno, apa kowe iki [kamu ini] bener-bener asli? Ya, engkau itu dianggap asli Indonesia. Tetapi apakah saya betul-betul asli itu? Mboten sumerep [tidak tahu]. Saya tidak tahu, Saudara-Saudara. Coba lah, siapa bisa menunjukkan asli atau tidak asli dari darahnya itu. Saya ini tidak tahu, Saudara-Saudara, dianggap asli. Tetapi mungkin saya itu juga 10%, 5%, 2%, ada darah Tionghoa di dalam badan saya ini! Kalau melihat sifat saya, Saudara-Saudara, saya ini sedikit-sedikit rupa Tionghoa. Nah, terang-terangan, saya ini kan rupanya saya sudah kelibatan sedikit Tionghoa!” (Soekarno, 1963).

Apa yang disampaikan Bung Karno ini juga menjadi aspirasi orang Tionghoa Lasem, seperti yang diungkapkan Heru Karyanto. Kegelisahan akan identitas inilah yang menjadi pemicu munculnya usaha untuk terlibat dalam sebuah kelompok sosial-budaya bernama bumiputra.

7 Wawancara dengan Akrom Unjiya, 08 Agustus 2012

8 Wawancara dengan Galih Pandu, 7 Agustus 2012.

Pada konteks riset tentang orang Tionghoa di Indonesia, silang identitas ini tergambar pada identitas hibrid yang terjadi. Di Lasem, hibriditas terjadi sebagai bagian dari proses interaksi komunal selama beberapa abad, diantaranya melalui perkawinan silang dan interaksi budaya. Dalam risetnya tentang orang Tionghoa di Indonesia pasca rezim Soeharto, Chang-Yau Hoon melihat bahwa identitas hibrid merupakan bagian dari formasi identitas orang Tionghoa, yang masih membawa warisan etnis namun tetap mengadopsi dan menjadi bagian dari nilai-nilai keindonesiaan. Chang-Yau Hoon menuliskan; *hybridity—an accomodation of culture and peoples at the local level—is one of the ways to deconstruct the dichotomy between us and them. In Indonesia, the appreciaition of such hybrid identities might dissolve the rigid line between “Chinese” and “non-Chinese”, “pribumi” and “non-pribumi”. The breakdown of these dichotomies would help to soften the essentialized differences associated with Chineseness and pribumi identity* [hibriditas—sebuah akomodasi kebudayaan dan orang-orang pada level lokal—adalah sebuah jalan dekonstruksi dikotomi antara kita dan mereka. Di Indonesia, apresiasi terhadap identitas hibrida mungkin melumerkan garis tegas antara “Cina” dan “non-Cina,” antara “pribumi” dan “non-pribumi.” Turunan dari dikotomi itu membantu untuk melembutkan esensi dari perbedaan asosiasi ke-cinaan dan identitas pribumi] (Hoon, 2008: 24).

Relasi sosial antar budaya bagi orang Tionghoa dan kelompok pemudanya, berpengaruh pada indentitas sosial mereka. Pemuda Tionghoa di Lasem merasa sebagai bagian dari orang Indonesia, sebab mereka telah lahir dan besar di Lasem, sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Mereka berargumentasi bahwa tidak ada alasan untuk menjadi bagian dari “yang lain” dalam status sebagai orang Indonesia

asli. Nasionalisme keindonesiaan ini juga ditopang oleh keberpihakan pemuda Tionghoa pada tradisi dan ritual berbasis klenteng yang mempertemukan ragam budaya dalam ruang yang sama. Hal ini bisa dilihat pada Kirab Budaya Mak Co Thian Siang Sing Bo di Klenteng Cu An Kiong, April 2012 lalu. Dalam peristiwa budaya itu pemuda Tionghoa berperan sebagai motor penggerak kegiatan yang bekerjasama dengan pemuda pribumi Jawa dan kalangan santri di Lasem.

RITUAL BUDAYA TIONGHOA LASEM

Di kalangan orang Tionghoa Lasem, relasi harmonis juga mendorong bangkitnya ritual-ritual budaya yang didasarkan pada upacara keagamaan maupun berbasis pada tradisi klenteng. Perayaan Imlek, Cap Go Meh, Peh Cun, dan kirab budaya Mak Co Thian Siang Sing Bo di klenteng Cu Ang Kiong diselenggarakan secara semarak. Meningkatnya ekspresi kultural orang Tionghoa juga didorong oleh legitimasi hukum nasional yang memberi ruang gerak bagi kelompok ini untuk tampil di ruang publik. Dorongan Keppres dari Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000 dan Kepres dari Presiden Megawati pada 2002, turut melegitimasi bangkitnya tradisi Tionghoa di Indonesia. Dalam konteks di Lasem, keberpihakan hukum nasional yang mengakomodasi ritual orang Tionghoa terkoneksi dengan hubungan harmonis antarwarga. Perayaan Kirab Budaya untuk memperingati Mak Co Thian Siang Sing Bo di klenteng Cu Ang Kiong pada 21-22 April 2012 menjadi salah satu bukti bangkitnya ritual orang Tionghoa di Lasem.

Perayaan kirab budaya tersebut diikuti oleh 68 klenteng se-Indonesia, yang dihadiri puluhan ribu peserta⁹. Kesuksesan kirab ini turut meningkatnya posisi orang Tionghoa di Lasem, pada periode pasca Orde Baru.

9 Catatan pengamatan lapangan, 22 April 2012.

Perayaan kirab ini sangat penting untuk menjelaskan posisi sosial-budaya orang Tionghoa yang terjepit pada masa rezim Soeharto, yang mempersempit ruang gerak peranakan Tionghoa di semua kota di Indonesia. Perayaan ritual pasca Orde Baru mengkonstruksi identitas orang Tionghoa di tengah negosiasi, kontestasi maupun hubungan saling membutuhkan antara orang Tionghoa dengan pribumi Jawa dan santri di Lasem.

REGENERASI ORGANISASI TIONGHOA DI LASEM

Bangkitnya ritual budaya orang Tionghoa di Lasem pada periode pasca Orde Baru juga terjalin seiring dengan regenerasi organisasi di kalangan internal kelompok ini. Legitimasi hukum yang diberikan oleh presiden Abdurrahman Wahid agar orang Tionghoa dapat tampil bebas di ruang publik dengan ekspresi budaya, tradisi dan kepercayaannya meningkatkan aktivitas organisasi-organisasi Tionghoa yang terdapat di Lasem.¹⁰ Pada masa Orde Baru, organisasi Hoo Hap Hwee Kwan Rukun Sentosa dan Yayasan Tridarma yang membawahi klenteng Cu Ang Kiong terbatas ruang geraknya.

Setelah Orde Baru tumbang, ruang gerak organisasi Tionghoa semakin meluas, dengan dukungan Keppres 2001 dari Presiden Abdurrahman Wahid. Hal inilah yang menjadikan jejaring koneksi organisasi orang Tionghoa di Lasem semakin meluas. Organisasi Hoo Hap Hwee Kwan menjalankan kembali fungsinya untuk mengurus upacara kematian anggotanya yang sebagian besar merupakan orang Tionghoa di Lasem dan sebagian kecil pribumi Jawa. Meningkatnya kerja organisasi ini diiringi dengan regenerasi

pengurusnya, yang mengakomodasi aktivis muda Tionghoa di Lasem.

Kondisi serupa terjadi pada organisasi Yayasan Trimurti Tridarma Lasem, yang membawahi tiga klenteng dan dua vihara; yakni Klenteng Cu Ang Kiong (Dasun), Klenteng Poo An Bio (Karangturi), Klenteng Gie Yong Bio (Babagan), serta Vihara Karuna Dharma dan Vihara Maha Karuna. Terbukanya ruang sosial warga Tionghoa pasca Orde Baru berdampak pada meningkatnya aktivitas organisasi sosial, termasuk juga Yayasan Tridarma Trimurti Lasem, yang lebih banyak bergerak pada wilayah ritual keagamaan. Organisasi ini juga melangsungkan regenerasi dengan memberikan peran bagi pemuda Tionghoa di Lasem. Beberapa pemuda-pengusaha Tionghoa di Lasem, seperti Ferry, Boen Hong, dan Rudi dipercaya sebagai pengurus Yayasan Trimurti yang dikombinasikan dengan kalangan senior orang Tionghoa.

Kerja sosial pemuda Tionghoa yang menjalankan organisasi Hoo Hap Hwee Kwan Rukun Sentosa dan Yayasan Tridarma Trimurti berpengaruh pada meningkatnya intensitas ritual keagamaan dan tradisi Tionghoa di Lasem, terbukti dengan suksesnya ritual kirab budaya perayaan Mak Co Thian Siang Si Bo, pada 21-22 April 2012. Ritual kirab budaya ini merupakan salah satu dari usaha pemuda Tionghoa di Lasem untuk menunjukkan peran, posisi dan identitas sosialnya.

Bangkitnya organisasi-organisasi orang Tionghoa meningkatkan intensitas komunikasi internal pada kelompok mereka. Peningkatan komunikasi ini menguatkan solidaritas sosial yang tergambar pada program-program kerja yang dilakukan bersama, dengan kepentingan untuk memberi kontribusi pada masyarakat Lasem secara utuh. Terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Lasem (FKML) yang diinisiasi oleh tokoh Tionghoa dan kiai, yang kemudian menjadi jembatan sosial untuk

10 Inpres Presiden Abdurrahman Wahid, No. 6/2000.

menjaga nilai harmoni yang disepakati bersama antar-warga Lasem. Program sosial organisasi Hoo Hap Hwee Kwan Rukun Sentosa dan Yayasan Klenteng Tridarma Trimurti seperti membantu prosesi upacara kematian, perayaan pernikahan, donor darah dan pengobatan, berdampak pada meningkatnya kepercayaan warga Lasem terhadap orang Tionghoa.

NASIONALISME PEMUDA LASEM

Dalam konteks Asia, nasionalisme pemuda terjadi dalam spektrum yang berbeda di tiap negara. Nasionalisme pemuda Jepang ditentukan oleh konteks global, media dan intelektualitas, merosotnya partai berhaluan kiri, meningkatnya popularitas manga (komik Jepang), internet, dan even-even olahraga internasional.¹¹ Sedangkan, nasionalisme pemuda Korea terbelah antara tegas memilih haluan berkiblat pada Amerika, di sisi lain, nasionalisme Inter-Korea dengan keberpihakan pada Korea Selatan. Pemuda Korea yang tidak mempunyai memori perang dan menurunnya ketakutan pada komunisme, lebih memilih berpihak pada Korea Utara, meski mereka tetap bergaya Barat.¹²

Di Indonesia, nasionalisme orang Tionghoa terjadi karena proses sejarah yang panjang; dari proses kehadiran mereka di nusantara, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, rezim Soekarno, Orde Soeharto dan kemudian puncak tragedi 1998. Peristiwa-peristiwa sejarah itu berpengaruh pada identitas dan orientasi orang Tionghoa di Indonesia. Pengaruh “masalah Tionghoa” berupa stereotipisasi, diskriminasi dan pe-

ngaruh politik memberi makna atas identitas internal maupun komunal orang Tionghoa.

Leo Suryadinata, salah seorang intelektual Tionghoa, menuturkan bahwa, kunci penyelesaian “masalah Tionghoa” di Indonesia tidak saja terletak pada adanya sistem perekonomian yang lebih adil dan merata serta sistem politik demokratis, akan tetapi sama pentingnya juga adalah konsep bangsa Indonesia. Konsep bangsa Indonesia yang kaku (*rigid*), yaitu, konsep pribumi selalu menjadi rintangan besar untuk terintegrasinya orang Tionghoa, terutama yang peranakan, ke wadah bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada konteks sejarah terbentuknya negara-negara di Asia Tenggara.

Pada umumnya, negara di Asia Tenggara bisa dibagi atas dua jenis: “negara pribumi” (*indigenous state*) dan “negara imigran” (*immigrant state*). Indonesia sebagai negara pribumi lain dari negara imigran. Konsep bangsa dalam kedua macam negara ini pun berbeda. Yang pertama lebih berasaskan pada *ethno-nation*, sedangkan bentuk kedua berasaskan pada *social-nation*. Dalam masalah Tionghoa, konsep bangsa itu lebih dekat pada *ethno-nation*, karena yang dititikberatkan adalah kepribumiannya. Dalam arti ini, konsep bangsa Indonesia lebih berdasar pada ras atau etnis. Orang Tionghoa harus terlebur menjadi pribumi atau salah satu suku pribumi, dan kalau itu terjadi, barulah mereka menjadi “bangsa” Indonesia yang lengkap.¹³

Di dalam historiografi Indonesia, pada awal abad 20, keberpihakan orang Tionghoa terpusat pada kutub yang berbeda. Keberpihakan ini tampak pada pilihan organisasi yang menjadi latar belakang gerakan sosial. orang Tionghoa yang mendukung organisasi Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK) lebih berorientasi pada negeri Tiongkok,

11 Sasada, Hironori . 2006. Youth and Nationalism in Japan. *SAIS Review*, Volume 26, Number 2, Summer-Fall. Hal. 109-111.

12 Sook-Jong Lee. 2006. *The Assertive Nationalism of South Korean Youth: Cultural Dynamism and Political Activism*. *SAIS Review*, Volume 26, Number 2, Summer-Fall. Hal. 123-5.

13 Leo Suryadinata. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, 1965-2008*. 2008: 188.

sedangkan pilihan pada Chang Hwa Hui (CHH) merupakan tipikal pendukung pemerintahan Belanda. Di sisi lain, ada kelompok orang Tionghoa yang mendukung nasionalisme Indonesia, dengan berpihak pada Partai Tionghoa Indonesia. Nasionalisme orang Tionghoa di Indonesia juga tampak pada terbitan-terbitan pers di awal abad 20. Melalui terbitan-terbitan berkala, orang-orang Cina berpihak pada kemerdekaan Indonesia, dengan bukti tulisan-tulisan yang memberikan dukungan pada perjuangan untuk melawan rezim kolonial.¹⁴

Di kalangan pemuda Tionghoa di Lasem, nasionalisme dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjadi bagian dari orang Indonesia. Hal ini dirasakan oleh Ferry, pemuda Tionghoa di Lasem:

“Saya mempunyai memori tentang Indonesia dan nasionalisme sejak masa kecil. Pada waktu sekolah di sekolah dasar, saya sangat senang dengan kegiatan pramuka. Apalagi, saya juga dekat dengan teman-teman saya yang orang pribumi Jawa di Lasem. Kami bergaul di sekolah dan juga ketika waktu bermain di sore hari. Di kegiatan pramuka, saya mendapatkan banyak pengalaman sebagai warga Lasem, sebagai bagian dari orang Indonesia. Dari pengalaman-pengalaman masa kecil itu, saya merasa bahwa saya orang Indonesia yang asli. Kakek nenek saya juga lahir di Indonesia, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyebut diri sebagai orang Indonesia.”¹⁵

Ungkapan Ferry tersebut menjadi salah satu gambaran betapa pemuda Tionghoa di Lasem terbentuk pada lingkungan antar budaya yang harmonis. Meskipun ada ancaman keharmonisan pada Mei 1998,

namun hubungan antar kelompok di Lasem masih terjaga dengan baik hingga kini.

“Saya tidak menyalahkan teman-teman pemuda Tionghoa di kota-kota besar, semisal Jakarta dan Surabaya yang kemudian memilih sekolah di luar negeri, bekerja di lembaga internasional dan kemudian tidak mau kembali ke Indonesia. Itu adalah pilihan mereka, dan saya kira mereka berkomitmen dengan pilihan-pilihan mereka. Namun, saya lebih memilih tinggal di Lasem, meneruskan usaha keluarga saya, dan membantu kegiatan di klenteng. Di Yayasan Klenteng, saya mendapatkan tanggungjawab sebagai wakil ketua, sedangkan di Hoo Hap Hwee Kwan, saya sebagai ketuanya. Saya mengajak teman-teman saya untuk sedikit demi sedikit terlibat dalam kegiatan bakti sosial di Hoo Hap, dan juga membantu klenteng.”¹⁶

Lalu, bagaimana iklim organisasi orang Tionghoa di Lasem? Kiprah pemuda Tionghoa seperti Ferry, Boen Hong dan Rudy tidak bisa dilepaskan dari keberpihakan tokoh-tokoh organisasi pada generasi sebelumnya. Heru Karyanto, tokoh organisasi Tionghoa dan inisiator perdamaian pada Mei 1998 di Lasem, mengungkapkan betapa organisasi-organisasi Tionghoa perlu dikelola oleh pemuda yang enerjik dan visioner.

“Kami sebelumnya gundah, jika pemuda-pemuda orang Tionghoa malah banyak yang pergi ke kota besar untuk kuliah dan bisnis. Hal ini akan membuat Lasem menjadi sepi, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1990. Satu generasi pemuda Tionghoa banyak yang kuliah dan bekerja di Surabaya dan Jakarta, sebab di kota besar lebih menjanjikan. Juga, pengaruh kebijakan rezim Orde Baru yang sangat diskriminatif. Namun, setelah reformasi, dengan kebi-

14 Abdul Wakhid. *Modal Cina Dan Nasionalisme Indonesia: Industri Pers Cina Pada Masa Pergerakan Nasional, 1910-1942*. Lembaran Sejarah. 1999. II (1).

15 Wawancara dengan Ferry, ketua Hoo Hap Hwee Kwan, Lasem. 3 November 2012.

16 Wawancara dengan Ferry, ketua Hoo Hap Hwee Kwan, Lasem. 3 November 2012.

jakan presiden Gus Dur yang memihak orang Tionghoa, banyak pemuda yang kemudian kembali ke Lasem, membangun bisnis mereka dan kemudian berkecimpung di organisasi sosial.”¹⁷

Proses transformasi kepemimpinan di organisasi Tionghoa (Hoo Hap Hwee Kwan dan Yayasan Tridarma Trimurti) di Lasem, juga dipengaruhi oleh ruang yang diberikan oleh tokoh-tokoh organisasi dari generasi sebelumnya, seperti yang disampaikan Heru Karyanto. Jadi, ada proses dua arah yang terjadi pada transformasi kepemimpinan organisasi Tionghoa: (1) ruang yang diberikan dari kalangan senior pemegang kepemimpinan organisasi pada generasi sebelumnya (2), visi dari kelompok pemuda Tionghoa untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan tradisi yang berlandaskan nilai-nilai multikultur dan nasionalis.

IDENTITAS PEMUDA TIONGHOA

Dari kajian yang pernah dilakukan tentang identitas pemuda Tionghoa pada paruh pertama abad ke-20 dipetakan dalam tiga bagian: (1) Kelompok yang berorientasi pada budaya Tionghoa, yang tergabung pada Tiong Hwa Hwee Kwan; (2) Mereka yang cenderung mendukung Belanda, pada kelompok Chang Hwa Hwee; dan (3) Mereka yang berpihak pada nasionalisme Indonesia, sebagaimana pendukung Partai Tionghoa Indonesia (PTI) (Darini, 2010: 3-5, Kwartanada, 2011: 2-3). Identitas ini mengalami perubahan setelah tragedi 1965, represi pemerintahan Orde Baru, tragedi 1998 dan perubahan orientasi pemerintahan reformasi. Identitas pemuda Tionghoa di Lasem tak lepas dari narasi harmoni dalam sejarah antar budaya di Lasem.

Nilai-nilai harmoni yang menjadi landasan hidup masyarakat Lasem turut menjaga stabilitas keamanan dan kepercaya-

aan sesama warga lintas etnis maupun agama. Perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan pribumi Jawa dan santri memungkinkan untuk terus berlangsung lewat konversi agama karena pengaruh undang-undang pernikahan di Indonesia. Perkawinan silang ini masih tetap menjadi jembatan sosial untuk menjaga ikatan persaudaraan antarwarga di Lasem yang telah berlangsung selama lebih dari lima abad.

Keberlangsungan perkawinan campuran sebagai bentuk harmoni sosial di antara warga Lasem, memunculkan kategori sosial baru dengan hadirnya generasi peranakan. Karena perkawinan campuran merupakan peristiwa lumrah di Lasem, tidak ditemukan generasi orang Tionghoa “totok” atau “baba,” yakni mereka yang masih memiliki darah murni dari etnis Tiongkok. Generasi peranakan Tionghoa yang muncul dari perkawinan silang antarwarga di Lasem inilah yang menjadi bagian dari tipologi penduduk Lasem pada abad ini. Bahkan, hampir tidak bisa dibedakan secara tegas antara orang Tionghoa maupun pribumi Jawa. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melihat logat bicara, gaya pakaian, ritual maupun tradisi keseharian yang dilakukan oleh orang-orang di Lasem.

Munculnya generasi peranakan menjadikan relasi sosial semakin meningkat sebagai jembatan untuk menjaga harmoni antarwarga di Lasem. Generasi peranakan ini pula yang sekarang menjadikan sekat etnis, tradisi dan agama semakin luntur. Meluruhnya sekat-sekat kebudayaan di antara penduduk Lasem berpotensi meningkatkan nilai-nilai harmoni dan menjaga hubungan damai di kota ini. Proses *bonding* yang difasilitasi modal sosial tampak pada meningkatnya program sosial organisasi orang Tionghoa, sedangkan proses *bridging* tergambar pada suksesnya inisiasi damai yang digagas oleh Forum Komunikasi Masyarakat Lasem (FKML), yang diprakarsai oleh orang Tionghoa, pri-

17 Wawancara dengan Heru Karyanto, Lasem, 21 April 2012.

bumi Jawa dan santri. Mengenai hal ini, Robert Putnam menegaskan bahwa modal sosial bersandar pada kebaikan pada ruang internal dan ruang publik.

“Social capital can thus be simultaneously a private good and a public good. In many instances of social capital, some of the benefit goes to bystanders, while some of the benefits serve the immediate interest of the person making the investment.”

[“modal sosial dapat secara simultan menjadi ruang privat dan publik yang baik. Pada banyak contoh modal sosial, keuntungan menuju penonton, sementara beberapa keuntungan melayani kepentingan yang segera terhadap orang yang mencipta investasi”] (Putnam, 2002: 7).

Dengan demikian, organisasi-organisasi sosial orang Tionghoa menguatkan rasa percaya diri di antara kelompok ini dan meningkatkan kepercayaan orang Lasem terhadap mereka.

Terjaganya harmoni di antara orang Lasem yang memiliki keragaman etnik, budaya dan agamanya ditentukan oleh peran agensi dalam berbagi modal (*capital sharing*). Orang Tionghoa, pribumi Jawa dan santri di Lasem berada dalam mekanisme sosial yang memungkinkan berbagi modal dalam eskalasi yang berbeda. Kiai-kiai pesantren menggunakan modal simbolisnya berupa karisma dan kuatnya pengaruh mereka terhadap kosmologi serta cara pandang orang Lasem secara keseluruhan. Fatwa-fatwa keagamaan dan keluasan penguasaan ilmu agama menjadi modal budaya (*cultural capital*) kiai pesantren dan kelompoknya untuk eksis di tengah struktur sosial masyarakat Lasem. Sedangkan, orang-orang Tionghoa menggunakan terutama modal ekonominya untuk menumbuhkan rasa percaya dari orang pribumi Jawa dan santri di Lasem. Peran agen dalam distribusi modal dan mempro-

duksi makna objektif (Bourdieu, 2007: 79) menjadi penyangga keharmonisan di Lasem.

Tersebarinya kekuatan simbolis, sosial, budaya dan ekonomi di antara orang Tionghoa, pribumi Jawa dan santri menjadi bagian dari jejaring sosial untuk mengupayakan terjaganya keharmonisan. Modal (*capital*) menjadi perangkat penting untuk mengkonstruksi realitas, *the kind of capital, like trumps in a game of cards, are powers which define the chances of profit in a given field* [macam-macam modal, seperti kartu truf pada permainan kartu, yakni kekuatan yang mendefinisikan kesempatan meraih keuntungan pada arena yang terberi] (Bourdieu, 1991: 230). Kekuatan modal yang terdistribusi dalam mekanisme negosiasi maupun kontestasi antara orang Lasem memungkinkan tercapainya kesepakatan damai pada 1998, yang berimplikasi pada terjaganya hubungan harmonis di Lasem. Terjaganya perdamaian di Lasem ini menjadi identitas pembeda jika dibandingkan dengan kondisi Jakarta, Solo dan Semarang di mana pernah terjadi konflik komunal, berupa kekerasan anti-Tionghoa.

PENUTUP

Transformasi kepemimpinan pada dua organisasi Tionghoa di Lasem (Hoo Hap Hwee Kwan dan Yayasan Tri darma Trimurti) turut memberi ruang bagi pemuda Tionghoa untuk melakukan kerja sosial dan budaya di ruang publik. Kiprah pemuda-pemuda Tionghoa di organisasi-organisasi sosial juga meningkatkan relasi dengan kelompok Jawa pribumi dan santri di Lasem. Relasi tersebut berpengaruh pada cara pandang pemuda Tionghoa terhadap komunikasi antar budaya dan nilai-nilai nasionalisme yang mereka pahami. Dengan demikian, ruang sosial dan interaksi antar budaya turut membentuk identitas internal pemuda Tionghoa yang disandarkan pada

nilai-nilai nasionalisme. Kiprah pemuda Tionghoa pada kirab budaya Mak Co Thian Siang Sing Bo, pada April 2012 di Lasem, yang diselenggarakan dengan menggandeng sekitar 60 klenteng se-Indonesia, dan menjalin kerjasama dengan kelompok pemuda Jawa dan santri, menjadi refleksi identitas pemuda Tionghoa.

Kiprah pemuda Tionghoa di Lasem, dengan menggunakan organisasi sebagai media sosial, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berimplikasi pada meningkatnya relasi sosial antar komunitas dan membangkitkan perasaan sebagai orang Indonesia menjadi penanda identitas. Pemuda Tionghoa di Lasem, yang bergerak dengan organisasi sosial, tidak lagi berperan dalam konteks internal komunitas mereka, namun juga terlibat dalam isu-isu sosial masyarakat Lasem, yang terdiri beragam budaya. Relasi antar budaya tersebut membentuk identitas personal dan komunal pemuda Tionghoa tidak hanya tersekat dalam bilik etnis, namun membentuk kesadaran sebagai bagian dari “orang Indonesia”. Kegiatan-kegiatan sosial dan antar budaya yang mereka kelola menjadi bukti keberpihakan pemuda Tionghoa sebagai bagian dari pemuda Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawis, Aimee. 2009. *The Chinese of Indonesia and their search for identity: the relationship between collective memory and the media*. New York: Cambria Press.
- Darini, Ririn. 2010. *Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia, 1900-1945*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ju Lan, Tung. 2010. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa pasca peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kwartanada, Didi. 2011. *Dari Ibu Liem sampai John Lie: Sumbangsih Tionghoa di*

Masa Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Nabil Forum.

- Suryadinata, Leo. 1989. *The Ethnic Chinese in Asean States: Bibliographical Essays*. Singapore: ISEAS.
- _____. 2008. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, 1965-2008*. Jakarta: Kompas.
- Sukma, Rizal. *Indonesia and China; The Politics of a Troubled Relationship*. Routledge: London. 1999.
- Unjiya, Akrom. 2008. *Lasem: Negeri Dampawang, Sejarah yang Terlupakan*. Lasem: Fokmas.
- Wakhid, Abdul. 1999. Modal Cina Dan Nasionalisme Indonesia: Industri Pers Cina Pada Masa Pergerakan Nasional, 1910-1942. *Jurnal Lembaran Sejarah*. II (1).